

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Analisis Koordinasi Antar Bidang di BAPPPEDA Kabupaten Sumedang

¹Rexi Casnari Lamdu, ²Nurul Asri Pebirahayu, ³Santi Nuryani, ⁴Yayang Pupung G.R, ⁵Arif Rahman Sudrajat

¹²³⁴⁵STIA Sebelas April Sumedang
 e-mail : rexilamdu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Koordinasi antar Bidang di BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, faktor-faktor penghambat apa yang ditemui dalam Pelaksanaan Koordinasi Antar Bidang di BAPPPEDA Kabupaten Sumedang serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam Pelaksanaan Koordinasi Antar Bidang di BAPPPEDA Kabupaten Sumedang. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan metode purposive sampling. Dengan informan penelitian sebanyak 4 orang, yaitu Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam, Pelaksana Sub Bidang Infrastruktur, Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Sementara prosedur pengolahan dalam penelitian ini yaitu, data reduction, data display, data conclusion drawing/verification dan triangulasi. Hasil akhir penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksana Koordinasi Antar Bidang di BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, sudah berjalan efektif namun belum maksimal hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian ini. Berbagai pelaksanaan tugas tersebut menganut azas kesatuan komando dimana dalam setiap pelaksanaan Koordinasi, perintah serta pengambilan keputusan ada ditangan Kepala Badan. Dalam prakteknya pedoman kerja menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan koordinasi antar Bidang di BAPPPEDA Kabupaten Sumedang dan mengacu pada Renstra dan RPJMD.

Kata kunci: Analisis, Koordinasi, BAPPPEDA

Analysis of Interdisciplinary Coordination in BAPPPEDA of Sumedang Regency

Abstract

This study aims to determine the Analysis of Interdisciplinary Coordination in BAPPPEDA of Sumedang Regency, what are the inhibiting factors encountered in the Implementation of Interdisciplinary Coordination in BAPPPEDA Sumedang Regency and what efforts are being made to overcome the inhibiting factors in the Implementation of Interdisciplinary Coordination in BAPPPEDA Sumedang Regency. Informants in this study were determined using purposive sampling method. With 4 research informants, namely the Head of the Sub-Division of Natural Resources, Implementing the Sub-Division of Infrastructure, the Head of the Sub-Division of Government and the Head of the Sub-Division of Research and Development. The data collection techniques used are literature study, field studies (observations, interviews and documentation). While the processing procedures in this study are, data reduction, data display, data drawing drawing / verification and triangulation. The final results of this study concluded that the Implementation of Interdisciplinary Coordination in BAPPPEDA Sumedang Regency, has been running effectively but not yet maximally this can be known from the results of this study. The various implementation of these tasks adhere to the principle of unity of command where in every implementation of the Coordination, orders and decision-making are in the hands of the Head of the Agency. In practice, work guidelines form the basis of any coordination between the Fields in BAPPPEDA in Sumedang Regency and refer to the Strategic Plan and RPJMD.

Keywords: Analysis, Coordination, BAPPPEDA

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

A. PENDAHULUAN

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dilaksanakan untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilaksanakan selama 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun.

Dalam rangka usaha melaksanakan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan di daerah, maka dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk merencanakan pembangunan melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan BAPPPEDA. Peran BAPPPEDA dalam perencanaan pembangunan sangat penting, karena lembaga inilah yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Begitupula dalam perencanaan pembangunan di daerah Sumedang, peran BAPPPEDA sangatlah vital sebagai pembantu Bupati dalam perencanaan pembangunan supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh, terarah dan terpadu maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang di sesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, ditemukan adanya indikasi permasalahan yang mengarah pada belum terlaksananya koordinasi antar bidang dengan baik karena berbagai kendala dan hambatan di BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, yang indikasinya anatar lain :

1. Disposisi dari kepala tidak terkoordinasi dengan baik kepada setiap bidang di BAPPPEDA

Kabupaten Sumedang .

2. Belum efektifnya pembagian waktu dalam pelaksanaan tugas pada setiap bidang di BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, dimana antara tugas utama suatu bidang dengan tugas lain yang berhubungan dengan bidang lain tidak memiliki manajemen waktu yang jelas.
3. Adanya perbedaan persepsi disetiap bidang dalam pelaksanaan suatu kegiatan di BAPPPEDA Kabupaten Sumedang.
4. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu antar setiap bidang di BAPPPEDA Kabupaten Sumedang.

Diduga masalah - masalah yang terjadi pada koordinasi tersebut disebabkan oleh :

1. Struktur organisasi yang tidak dipahami sepenuhnya oleh setiap pegawai di BAPPPEDA Kabupaten Sumedang.
2. Rencana kerja yang tidak terealisasi dengan baik di BAPPPEDA Kabupaten Sumedang.
3. Prosedur kerja yang tidak dilakukan dengan baik di BAPPPEDA Kabupaten Sumedang
4. Pengawasan disetiap bidang tidak termonitor dengan baik di BAPPPEDA Kabupaten Sumedang.

B. PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai dasar permasalahan yaitu mengenai pelaksanaan koordinasi antar bidang. Berdasarkan pada hal tersebut, kemudian ditetapkan melalui fokus penelitian yaitu Analisis Koordinasi Antar Bidang di BAPPPEDA Kabupaten Sumedang yang dijadikan alur dalam melakukan penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Berdasarkan dengan adanya permasalahan mengenai Koordinasi Antar

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Bidang di BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang yang masih kurang baik, hal tersebut dapat ditinjau dari segi struktur organisasi, rencana kerja, prosedur kerja serta pengawasan. Selanjutnya untuk menjelaskan jawaban mengenai fokus permasalahan penelitian sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, melakukan analisis data hasil penelitian. Untuk mempermudah menganalisis data hasil penelitian maka dijelaskan dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian berdasarkan dimensi-dimensi yang bersumber dari Sugandha (1991 : 23), yaitu sebagai berikut : Struktur Organisasi, Rencana, Prosedur dan Pengawasan.

Untuk mengetahui hasil penelitian yang dijadikan sebagai jawaban dari fokus permasalahan dilakukan penelitian dengan menggunakan teknik pengambilan data seperti wawancara dengan beberapa informan di BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang serta pengamatan di lapangan, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai gambaran untuk kemudian dijadikan acuan dalam melakukan analisis sehingga dapat diketahui mengenai hasil penelitian tersebut.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan koordinasi antar Bidang di BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang sudah sesuai dan berpedoman pada uraian tugas serta tupoksi yang ada sehingga berbagai pekerjaan dan tugas yang dilaksanakan pegawai di BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang sudah jelas dan terstruktur dengan baik. Berbagai pelaksanaan tugas tersebut menganut azas kesatuan komando dimana dalam setiap pelaksanaan Koordinasi, perintah serta pengambilan keputusan ada ditangan Kepala Badan.

Dalam prakteknya pedoman kerja menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan koordinasi antar Bidang di BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang, dimana setiap koordinasi tersebut juga mengacu pada Renstra dan RPJMD serta rangkaian kegiatan yang telah ditentukan sehingga dalam pelaksanaannya koordinasi tersebut berjalan secara terstruktur sesuai prosedur dan SOP yang ada. Secara umum faktor penghambat dalam pelaksanaan koordinasi antar Bidang di BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang terdapat pada perbedaan pandangan di setiap Bidang mengenai berbagai tugas yang dikerjakan. Hal ini tentunya

berpengaruh terhadap pelaksanaan koordinasi itu sendiri, dimana dalam forum musyawarah yang dilakukan menelan waktu yang lama karena perbedaan pandangan tersebut. Selain itu walaupun setiap bidang di BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang memiliki tujuan yang sama, namun dalam pelaksanaannya setiap bidang tersebut memiliki program yang berbeda sehingga menjadi hambatan dalam proses koordinasi yang dilakukan. Hambatan perbedaan terhadap prioritas tugas dari setiap Bidang juga membuat proses koordinasi berjalan tidak sesuai harapan. Dalam pelaksanaannya, koordinasi antar bidang tersebut tidak terlaksana dengan lancar dikarenakan perbedaan skala prioritas terhadap setiap tugas yang dikerjakan oleh masing-masing Bidang.

Rekomendasi

Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam koordinasi antar Bidang di BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang. Salah satunya dalam perbedaan persepsi dan pandangan dalam setiap pekerjaan dapat dilakukan dengan melakukan Kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan. Dimana dalam pelaksanaan Koordinasi tersebut segala hal diputuskan lewat kesepakatan bersama dan diputuskan oleh Kepala BAPPPPEDA lewat koordinasi dengan semua Bidang yang terlibat. Salah satu contohnya dalam penyusunan perencanaan suatu program, setiap bidang dilibatkan untuk mengeluarkan ide dan gagasan masing-masing sampai akhirnya diputuskan oleh Kepala BAPPPPEDA.

Upaya lain yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam koordinasi antar Bidang di BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang adalah dengan forum musyawarah yang dilaksanakan baik secara rutin yang di agendakan maupun yang dilaksanakan secara situasional sesuai situasi kondisi yang ada. Forum musyawarah yang terjadwal salah satunya adalah forum OPD, yang melibatkan setiap Bidang yang ada di BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang. Melalui forum musyawarah tersebut berbagai hal bisa di koordinasikan dan di musyawarahkan bersama.

Setiap penetapan tujuan juga selalu di koordinasikan terlebih dahulu kepada setiap Bidang yang ada di BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang melalui forum musyawarah. Selain

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

lewat forum musyawarah, koordinasi juga dilakukan secara langsung saat pelaksanaan program berlangsung.

REFERENSI

Anggara, Sahya. 2015. *Metode Penelitian Administras*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Mintonegoro, A. 2000. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sarinah. 2002. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.

Silalahi, Ulbert. 1997. *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Cetakan Kedua. Bandung: Sinar Baru.

Sugandha, Dann. 1991. *Koordinasi : Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta: Intermedia.

Sugiyono. 1997. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.

Toha, Miftah. 2003. *Aspek-Aspek Pokok Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Toha, Miftah. 2017. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia.